

**IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI PEMBENTUK SIKAP
ISLANDIA TERHADAP UNI EROPA**

TESIS



Oleh:
Maria Alpha Carmelite
2016891010

Pembimbing 1:

Prof. v. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

Pembimbing 2:

I Nyoman Sudira, Ph.D

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI PEMBENTUK SIKAP ISLANDIA
TERHADAP UNI EROPA**



Oleh:
Maria Alpha Carmelite
2016891010

**Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Jumat, 11 Januari 2019**

Pembimbing 1:

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

Pembimbing 2:

I Nyoman Sudira, Ph.D

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2019**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Maria Alpha Carmelite
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016891010
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul: .

Identitas Nasional Sebagai Pembentuk Sikap Islandia Terhadap Uni Eropa

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 7 Januari 2019

Materai Rp. 6000,-

Maria Alpha Carmelite

ABSTRAK

Nama : Maria Alpha Carmelite

NPM : 2016891010

Judul : Identitas Nasional Sebagai Pembentuk Sikap Islandia Terhadap Uni Eropa

Penelitian ini mengkaji sikap Islandia terhadap Uni Eropa menggunakan konsep identitas nasional sebagai pembentuknya. Oleh sebab itu, pertanyaan riset yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah, **““Bagaimana isu identitas nasional membentuk sikap Islandia terhadap Uni Eropa?”** Metode yang di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan penulis dalam membantu proses analisis adalah konsep identitas nasional menurut Anthny D. Smith, dengan teori konstruktivisme serta konsep-konsep dalam teori pengambilan kebijakan luar negeri.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat komponen identitas nasional Islandia yang menjadi faktor pembeda dalam pembentukan sikap terhadap Uni Eropa. *Historic territory* menjadi komponen pertama yang didasarkan pada teritori Islandia sebagai pembentuk identitas nasionalnya sebagai negara dependen. Kedua, *common myths and historical memories* atau sejarah Islandia di masa lalu yang membentuk rasa nasionalisme negara ini. Ketiga, *common public culture* yang berasal dari budaya Viking yang mempengaruhi karakteristik masyarakat negara ini. Keempat, *common legal rights and duties for all members* yaitu peranan politik domestik Islandia dalam mengambil kebijakan tertentu. Kelima, *common economy with territorial mobility members* yang berkaitan dengan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian negara ini.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perbedaan identitas yang dimiliki Islandia telah membentuk sikap Euroskeptisisme sehingga mendorong negara ini untuk tidak bergabung dengan Uni Eropa.

Kata Kunci : Islandia, Uni Eropa, Identitas Nasional

ABSTRACT

Name : Maria Alpha Carmelite

NPM : 2016891010

Title : National Identity in Shaping Iceland's Attitudes Toward EU

*This research will assess Iceland's attitude towards the European Union that formed by the country's national identity. The question that will guide this research is: **“How does the national identity shape Iceland's attitude towards the European Union?”** while the method that will be employed is the qualitative research method. The theoretical framework that will serve as a tool for analysis will include Anthony D. Smith's concept regarding the national identity, supplemented by constructivism theory and concepts from the foreign policy decision-making theory.*

This research's finding demonstrates that there are five Iceland's national identity components which are the differentiating factor in forming attitudes towards the European Union. Historic territory is the first component based on Iceland territory as in forming national identity as a dependent state. Second, common myths and historical memories that explained Icelandic history that shaped the sense of nationalism of this country. Third, a common public culture originating from the Viking culture that influences the characteristics of this country's society. Fourth, common legal rights and duties for all members are explaining about Iceland's domestic political role in taking certain policies. Fifth, common economy with territorial mobility members related to the fisheries sectors as one of the main pillars of the country's economy.

It can therefore be concluded the differences between Iceland's and European Union's identity have shaped the Euroscepticism attitude, which has encouraged this country not to join the European Union.

Keywords: Iceland, European Union, National Identity.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas segala berkat dan penyertaan-Nya dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik. tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Tesis ini mencoba mendeskripsikan pembentukan sikap Islandia terhadap Uni Eropa berdasarkan konsep Identitas Nasional. Oleh sebab itu, skripsi ini diberi judul, “Identitas Nasional Sebagai Pembentuk Sikap Islandia Terhadap Uni Eropa.”

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab inilah, penulis terbuka atas kritik, saran, pendapat yang membangun terkait tesis ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang tertarik terhadap topik yang diangkat dalam tesis ini. Selain itu juga, penulis berharap bahwa tesis ini dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain.

Bandung, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.2.3 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Pengumpulan Data	25
1.6.1 Metode Penelitian dan Jenis Penelitian	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	26
1.7 Sistematika Penulisan	26
BAB II IDENTITAS DAN KULTUR POLITIK ISLANDIA	28
2.1 Identitas Islandia	29
2.1.1 <i>Historic Territory</i> : Karakteristik Islandia berdasarkan Aspek Geografisnya	29
2.1.2 <i>Common Myths and Historical Memories</i> : Faktor Historis	

Islandia	31
2.1.3 <i>Common Public Culture: Budaya Bangsa Islandia</i>	33
2.1.4 <i>Common Legal Rights and Duties For All Members: Politik</i> Domestik Islandia	36
2.1.5 <i>Common Economy with Territorial Mobility Members: Sistem</i> Perekonomian Islandia	41
2.2 Peranan Islandia di Eropa	43
2.2.1 <i>Territorial Islandia sebagai Penentu Keanggotaan terhadap</i> <i>Organisasi Regional</i>	44
2.2.2 <i>Kontribusi Islandia dalam Kerjasama Sosio-Ekonomi pada</i> <i>Kawasan Eropa</i>	51
 BAB III PERDEBATAN ISLANDIA UNTUK MENJADI	
ANGGOTA UNI EROPA	59
3.1 <i>Pra-aplikasi keanggotaan Uni Eropa (1944-2008)</i>	60
3.2 <i>Proses aksesasi terhadap keanggotaan Uni Eropa (2008-2015)</i>	64
3.3 <i>Pasca pembatalan aplikasi keanggotaan (2015-2017)</i>	70
 BAB IV ANALISIS IDENTITAS NASIONAL ISLANDIA	
DALAM PEMBENTUKAN SIKAP TEHADAP UNI EROPA	74
4.1 <i>Persamaan dan Perbedaan Identitas Nasional Islandia dan Uni Eropa</i>	74
4.1.1 <i>Historic Territory</i>	78
4.1.2 <i>Common Myths and Historical Memories</i>	81
4.1.3 <i>Common Public Culture</i>	83
4.1.4 <i>Common Legal Rights and Duties for All Members</i>	87
4.1.5 <i>Common Economy with Territorial Mobility Members</i>	90
4.2 Peranan Politik Domestik Islandia dalam Menentukan Sikap terhadap Uni Eropa	99
 BAB V KESIMPULAN	103
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Bab-bab Acquis	69
Tabel 4.1 Penerapan Norma pada Uni Eropa dan Islandia.....	75
Tabel 4.2 Perbedaan Islandia dan Uni Eropa menurut konsep identitas nasionaI Anthony Smith.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bab Acquis yang telah dibuka dalam proses aksesi Islandia terhadap Uni Eropa	68
--	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Alur Berpikir dalam Kerangka Teori	15
Diagram 2.1 Komposisi Wanita dalam Pemerintahan Islandia.....	38

DAFTAR SINGKATAN

CM	: <i>Common Market</i>
EAEC	: <i>European Atomic Energy Community</i>
ECB	: <i>European Central Bank</i>
ECSC	: <i>European Coal and Steel Community</i>
<i>EEA Agreement</i>	: <i>Economic European Area Agreement</i>
EEA	: <i>Economic European Area</i>
EEC	: <i>European Economic Community</i>
EFTA	: <i>European Free Trade Area</i>
EMU	: <i>Economic and Monetary Union</i>
ERM	: <i>Exchange Rate Mechanism</i>
EURATOM	: <i>European Atomic Energy Community</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
IADS	: <i>Iceland Air Defense System</i>
ICG	: <i>Icelandic Coast Guard</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
IPA	: <i>Instrument for Pre-accession Assistance</i>
PBB	: <i>Persatuan Bangsa-bangsa</i>
SAP	: <i>Stabilization and Association Process</i>
SDA	: <i>Social Democrat Alliance</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Identitas nasional pada awalnya merupakan isu yang kurang dominan untuk mengkaji isu-isu global, terkait dengan pola perilaku suatu aktor terhadap aktor lainnya. Dalam hubungan internasional terdapat setidaknya tiga esensi yang menentukan bagaimana suatu interaksi antar aktor dapat terbentuk, yaitu aktor itu sendiri, kepentingan nasional dan *power*.¹ Sebelum berakhirnya Perang Dingin, *power* menjadi hal yang diutamakan oleh aktor. Pola interaksi suatu bangsa ditentukan oleh kesadaran akan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam anarki. Oleh karena hal tersebut, terjadilah persaingan kekuatan hingga menimbulkan konflik. Seperti yang dialami di Eropa yang merupakan kawasan yang menjadi nadi dari peperangan besar yang terjadi di masa lalu, seperti halnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Namun seiring dengan kemajuan zaman dan berakhirnya peperangan besar dunia, pola interaksi yang bersifat ofensif semakin memudar hingga kemunculan atas ide-ide untuk membangun kerjasama antar negara.² Begitu pula dengan esensi

¹ Enggartias Wahana Putera, "Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 19 September 2018, <http://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/>

² *Ibid.*

dari hubungan internasional pun memiliki perluasan, dimana telah diakuinya aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kelompok-kelompok, bahkan aktor individu. Selain itu, identitas nasional menjadi hal yang esensial dan memiliki pengaruh dalam segala tindakan yang dilakukan oleh suatu aktor, terutama negara. Nilai-nilai dan norma suatu bangsa yang terkumpul dalam suatu identitas menentukan karakteristik dan peranan suatu bangsa, sehingga kepentingan bangsa tersebut dapat terbentuk dan menjadi penentu bagaimana suatu bangsa bersikap dan memberikan respon terhadap apa yang terjadi di dunia luar. Identitas nasional juga pada akhirnya akan membentuk kultur atau budaya suatu bangsa yang tidak kalah pentingnya bagi suatu negara sehingga memperkokoh karakteristik dan pola-pola interaksi yang akan terbentuk. Peranan identitas nasional berhubungan erat dengan bagaimana negara berinteraksi dengan aktor lain dalam hubungan internasional sehingga mampu memahami apa tujuan dari masing-masing aktor dan memiliki kompromi dalam mencapai kepentingannya masing-masing.³

Meskipun era globalisasi ini membuat batas-batas interaksi antar aktor semakin memudar, namun penentuan dan kesadaran akan “who we are?” yang dimiliki oleh aktor tersebut dapat membatasi seberapa besar aktor tersebut untuk terlibat aktif dalam suatu hubungan, baik yang bersifat kerjasama, konflik, maupun kompromi tertentu.⁴ Dalam konteks negara, hal ini berkaitan dengan seberapa besar nasionalisme yang dimiliki. Nasionalisme ini terbentuk atas dasar kesadaran akan persamaan yang dimiliki oleh suatu bangsa, seperti sejarah dan perjuangan di

³ Anthony Smith, *National Identity* (London: Penguin Group, 1991), 71-79.

⁴ Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Classical and Contemporary Theory* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013), 118-120.

masa lalu, yang pada akhirnya membentuk rasa cinta tanah air. Oleh rasa nasionalisme ini yang tetap memberikan batasan suatu negara dalam berinteraksi atau menentukan kebijakan tertentu.

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang menjadi contoh keberhasilan proses integrasi karena telah mengalami proses pembauran identitas sehingga munculnya identitas baru, meskipun memiliki negara-negara anggotanya yang terkenal akan keanekaragaman identitas dan budayanya. Proses integrasi yang terjadi di dalam Uni Eropa merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara-negara anggotanya. Selain itu, negara-negara anggota organisasi ini juga memiliki kesadaran akan identitas yang terdiri atas persamaan nilai-nilai dan norma sebagai bagian dari kawasan Eropa yang memiliki sejarah masa lalu bersama, sehingga memiliki tujuan bersama membentuk Eropa yang kuat dan stabil. Hal ini yang menjadikan Uni Eropa sebagai organisasi yang unik dan dianggap memiliki kekuatan serta kestabilan tersendiri sehingga diminati oleh negara-negara di Eropa.⁵ Oleh sebab inilah, organisasi ini berkembang dan mengalami perluasan keanggotaan. Secara geografis, kini anggota dari Uni Eropa tidak hanya berada pada kawasan Eropa Barat daratan saja, namun mengalami perluasan hingga Eropa Utara dan Eropa Timur, seiring dengan pecahnya Uni Soviet di tahun 1990.⁶

Negara-negara yang mengajukan keanggotaan terhadap Uni Eropa perlu melakukan berbagai penyesuaian dengan identitas yang dimiliki oleh Uni Eropa,

⁵ Lauren M. McLaren, *Identity, Interests and Attitudes to European Integration* (Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006), 6-8.

⁶ "Perluasan, " Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Burnei Darussalam, dan ASEAN, diakses pada 6 Maret 2015, http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/enlargement/index_id.htm

sebagai konsekuensi sebagai anggota. Negara yang mengajukan keanggotaan harus mempertimbangkan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang, yaitu berbagai perubahan akan reorientasi politik maupun keterikatan dengan sejumlah ikatan perjanjian dalam proses adaptasi dengan norma dan aturan pada organisasi regional tersebut. Di sisi lain, keanggotaan terhadap Uni Eropa juga menjadi kepentingan nasional yang ingin dicapai terutama bagi negara-negara yang menyadari identitas dirinya sebagai bagian dari Eropa.

Sebagai bagian dari benua Eropa, Islandia merupakan salah satu calon kandidat anggota yang tepat bagi Uni Eropa.⁷ Adanya kesamaan norma dan keuntungan yang bersifat mutual menjadikan Uni Eropa terbuka akan kerjasama dengan negara ini. Kesadaran akan letak negaranya yang jauh berada di utara Eropa menjadikan Islandia mengalami pasang surut dalam keikutsertaannya dalam proses integrasi Eropa. Meskipun begitu, negara ini tidak sepenuhnya terisolir dari Eropa dan dibuktikan dengan keterlibatan negara ini dalam beberapa keanggotaan organisasi regional, seperti EFTA dan NATO, serta perjanjian-perjanjian, seperti Perjanjian Schengen dan Perjanjian EEA. Negara ini juga pernah memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan Uni Eropa, meskipun bersifat pasang surut sejak Islandia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1944. Puncak dari keinginan negara ini untuk bergabung dengan Uni Eropa terwujud ketika Islandia mengajukan aplikasi dan sempat melakukan proses akses keanggotaan terhadap

⁷ “European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Iceland,” European Commissions, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/iceland_en

Uni Eropa pada tahun 2009 hingga 2015, tepatnya ketika negara ini terkena imbas krisis global tahun 2008.⁸

Kajian mengenai pasang surutnya Islandia untuk menjadi anggota Uni Eropa ini menarik ketika melibatkan sudut pandang identitas nasional dan budaya yang dimiliki, baik oleh negara tersebut maupun oleh Uni Eropa. Karena dengan kondisi negara ini sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi penuh, negara ini memiliki jalan pintas yang memudahkan kesuksesan dari proses akses keanggotaan. Namun, negara ini lebih memilih untuk membatalkan proses akses tersebut meskipun tetap menginginkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan Uni Eropa dan negara-negara anggota dari organisasi regional tersebut.⁹ Tentunya, hal ini juga bergantung pada para pengambil kebijakan negara ini yaitu partai politik yang berkuasa di dalam negara ini serta preferensi masyarakat yang memiliki pengaruh besar bagi negara ini dalam membuat suatu kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memfokuskan diri kepada sudut pandang identitas nasional dan budaya yang menentukan Islandia dalam proses pengambilan kebijakan terhadap status keanggotaan Uni Eropa.

⁸ "Icelandic Parliament Votes for EU Membership," *The Guardians*, 16 Juli 2009, diakses pada 28 September 2014, <http://www.theguardian.com/world/2009/jul/16/iceland-parliament-votes-eu-membership>

⁹ Benjamin Fox, "Iceland's EU Bid is Over, Commission Told," *euobserver.com*, 14 Juni 2013, diakses pada 28 September 2014, <http://euobserver.com/political/120501>

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Keputusan Islandia di tahun 2015 untuk menghentikan proses aksesi keanggotaan Uni Eropa tersebut sangatlah disayangkan oleh Komisi Eropa, karena bear harapan bagi negara ini untuk dapat menyelesaikan proses aksesi dan negosiasi serta segera menjadi anggota dari Uni Eropa. Keputusan Islandia untuk mundur dari proses aksesi dan negosiasi tersebut merupakan hal yang bertolak belakang dari apa yang seharusnya terjadi dimana negara ini seharusnya dapat dengan mudah melampaui proses aksesi dan negosiasi tersebut serta segera resmi menjadi anggota dari Uni Eropa. Meskipun sempat kembali menjadi agenda politik, keanggotaan terhadap Uni Eropa tetap mendapatkan respon yang negatif, tidak hanya berasal dari hasil keputusan masyarakat dalam referendum secara online, akan tetapi parlemen pun memberikan respon yang serupa di tahun 2017. Mayoritas tetap memilih untuk memberikan membatasi ruang gerak kerjasama Islandia dengan Uni Eropa. Hingga pada akhirnya parlemen menyatakan bahwa agenda untuk melanjutkan proses aksesi keanggotaan Uni Eropa harus kembali diurungkan.¹⁰

Islandia merupakan kandidat yang sempurna bagi Uni Eropa, karena telah menerapkan 80% dari *Economic European Area Agreement (EEA Agreement)* sehingga sistem perekonomian negara ini telah sesuai dengan standar Uni Eropa.¹¹ Negara ini juga telah mengikuti perjanjian Schengen sehingga kebebasan

¹⁰ Martin Breum, "No thanks!" to EU and Nato, Iceland PM says," *EU Observer*, 29 Oktober 2018, <https://euobserver.com/nordic/143224>

¹¹ "Government Considers Iceland No Longer an EU Candidate," Ministry for Foreign Affairs, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Oktober 2014, <http://www.mfa.is/news-and-publications/nr/8377>

perpindahan antara masyarakat Islandia dengan masyarakat Eropa pun terjamin, baik secara konsesus yang berlaku maupun secara hak untuk berpindah. Islandia juga memiliki beberapa kesamaan dengan organisasi regional ini secara nilai dan norma. Islandia telah mengikuti pula perjanjian Dublin yang memberikan peluang bagi imigran untuk mendapatkan perlindungan. Inilah posisi dimana negara ini mampu menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan kesepakatan dan harapan dari Uni Eropa. Secara garis besar, identitas negara ini telah memiliki kemiripan dengan identitas Uni Eropa. Secara nilai dan norma, kesamaan Islandia dengan Uni Eropa telah dilihat melalui penerapan secara konsisten prinsip-prinsip organisasi ini sebagai nilai dan normanya, seperti menjunjung tinggi martabat manusia, demokrasi, *rule of law*, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak minoritas. Hal inilah yang memudahkan Islandia selama berlangsungnya proses akses dan ditandai dengan dekatnya rentang waktu sejak Islandia mengajukan proposal keanggotaan hingga diterimanya negara ini hingga menjadi negara anggota, yaitu satu tahun (Juli 2009-Juni 2010). Begitu juga dengan proses negosiasi yang dapat dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan kandidat anggota yang lainnya. Dalam rentang waktu 3 tahun, Islandia berhasil membuka 27 bab *acquis* dan 11 diantaranya telah ditutup karena kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai.¹²

Islandia termasuk menjadi bagian dari Uni Eropa, atau setidaknya secara regional merupakan bagian dari Eropa. Meskipun secara geografis, negara ini jauh dari benua Eropa, namun negara ini tetap memiliki warisan budaya Skandinavia

¹² Iceland membership status, *European Commission*, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/iceland_en

dan penerapan demokrasi liberal yang stabil serta ekonomi yang berkembang. Untuk Uni Eropa, keanggotaan Islandia akan menjadi bentuk perluasan organisasi ini pada wilayah utara dan menjadikan organisasi ini semakin kuat pada wilayah Artik, serta akan memberikan keseimbangan dengan ekspansi ke arah timur. Masuknya Islandia memiliki kecenderungan yang minimal untuk menimbulkan masalah mengenai asimilasi identitas nasional dibandingkan dengan negara-negara bekas komunis perekonomian berada jauh di bawah negara ini. Di sisi lain, Islandia sendiri akan mendapatkan “rumah” pada wilayah regional serta jaminan stabilnya pada bidang ekonomi dan keamanan. Interdependensi yang terjalin di dalam tubuh Uni Eropa akan membuat anggotanya semakin bersatu dan kuat, begitu juga dengan Islandia jika menjadi anggota akan berada pada posisi yang lebih kuat untuk berkontribusi di masa depan dalam menghadapi isu-isu global, seperti perubahan iklim, reformasi keuangan dan perdagangan, dan inisiatif keamanan dan pembangunan internasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kendala negara pulau di utara Eropa ini berasal dari preferensi masyarakat dan parlemen yang tidak menginginkan proses akses kembali dilakukan. Referendum masyarakat yang dilangsungkan secara online dan memiliki hasil yang serupa dengan voting yang dilakukan Althingi membuat semakin menjauhnya Islandia dari keanggotaan Uni Eropa. Jika melihat dari sudut pandang identitas nasional, Islandia memiliki persamaan yang cukup banyak dengan Uni Eropa. Akan tetapi, hal yang menarik pada sudut pandang ini, apakah negara ini benar-benar memiliki kesamaan atau justru memiliki perbedaan yang cukup fatal pada sisi Islandia, sehingga negara ini memilih untuk tidak bergabung dengan Uni Eropa?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi waktu penelitian dari tahun **2009** hingga **tahun 2018**. Tahun 2009 merupakan tahun dimana Islandia mengajukan pendaftaran untuk menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan tahun 2018 merupakan tahun dimana negara ini juga kembali memperbincangkan persoalan keanggotaan Uni Eropa setelah proses aplikasi keanggotaan tersebut telah resmi dihentikan pada tahun 2013. Penulis juga membatasi aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya Islandia sebagai negara beserta, rezim yang sedang mendominasi pada periode pemerintahan tertentu, serta keterlibatan masyarakat Islandia beserta beberapa organisasi lokal dan internasional lainnya yang dapat mendukung penjelasan penulis pada analisis kasus. Aksesori yang dimaksud adalah proses persiapan yang dilakukan kandidat anggota berdasarkan kriteria aksesori. Dalam proses ini, Islandia memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan proses aksesori sekiranya keanggotaan terhadap Uni Eropa tidak sesuai dengan identitas nasional dan juga dapat memenuhi kepentingan negara.

Penelitian ini akan memanfaatkan kerangka pemikiran Valerie M. Hudson pada penjabaran pendekatan model analisis kebijakan luar negeri, yaitu pada model model tingkat kultural dan identitas nasional serta menggunakan juga teori konstruktivisme menurut Alexander Wendt dan Bob Sugeng Hadiwinata dalam rangka menelaah pembentukan identitas nasional dan kepentingan negara. Konsep identitas nasional yang dikemukakan oleh Anthony D. Smith juga akan mendukung proses penjabaran data serta analisis untuk menjawab rumusan masalah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai batasan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

“Bagaimana isu identitas nasional membentuk sikap Islandia terhadap Uni Eropa?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana identitas nasional dapat mempengaruhi pembentukan sebuah kebijakan luar negeri khususnya dalam penentuan tingkah laku suatu negara untuk menjadi bergabung atau tidaknya dengan suatu organisasi maupun perjanjian yang bersifat multilateral.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap juga penelitian ini menjadi pertimbangan para pembaca dan peneliti lainnya dalam mencari literatur dan referensi mengenai bagaimana identitas nasional dan budaya dapat mempengaruhi pembentukan sebuah kebijakan luar negeri khususnya dalam penentuan tingkah laku suatu negara dalam bentuk

keanggotaan terhadap suatu organisasi maupun perjanjian yang bersifat multilateral.

1.4 Kajian Literatur

Tujuan pembuatan kajian literatur adalah untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme serta memastikan originalitas penelitian ini. Maka, dengan dibuatnya kajian literatur penulis dapat membuktikan bahwa penelitian ini tidak pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis akan membandingkan penelitian ini dengan beberapa kajian yang memiliki topik yang serupa. Penulis melakukan kajian terhadap empat karya tulisan mengenai Islandia dan Uni Eropa.

Literatur pertama merupakan artikel jurnal yang berjudul “*Iceland and the Crisis: Territory, Europe, Identity*” dan dibuat oleh Lucca Zarrilli.¹³ Kajian ini menggambarkan tentang Islandia sebagai negara pulau menyadari teritorinya yang kecil dan berada di ujung utara Eropa. Krisis global finansial telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan negara ini, baik secara ekonomi maupun secara sosial, sehingga keanggotaan Uni Eropa menjadi salah satu opsi yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi krisis global tersebut. Identitas nasional dijadikan Islandia sebagai patokan dalam pembentukan sikap serta setiap kebijakannya, terutama dalam mengatasi krisis global finansial tersebut. Zarrilli mampu

¹³ Lucca Zarilli. “Iceland and the Crisis: Territory, Europe, Identity,” *Revista Română de Geografie Politică* XIII, no.1 (2011): 5-15.

memaparkan bagaimana konsep identitas nasional memiliki pengaruh besar bagi penentuan tingkah laku serta pembentukan kebijakan karena pada dasarnya Islandia memang merupakan negara yang memiliki kebanggaan terhadap identitas dan sejarahnya. Penekanan secara geografis dijadikan landasan utama Zarrilli dalam memulai argumennya terhadap sikap Islandia terhadap Uni Eropa. Namun, disisi lain, penekanan secara teritorial saja tidaklah cukup untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dapat terbentuk. Cakupan bahasan dalam artikel ini juga hanya sebatas pengajuan Islandia untuk keanggotaan Uni Eropa saja dan tidak mencangkup bahasan mengenai alasan negara ini menarik diri dari Uni Eropa.

Artikel kedua berasal dari Jurnal *Scandinavian Studies*, Volume 1, Tahun 2002, yang ditulis oleh Baldur Thorhallsson dan berjudul “*The Skeptical Political Elite Versus the Pro-European Public: The Case of Iceland.*”¹⁴ Artikel ini mendeskripsikan bagaimana suara masyarakat Islandia, yang saat itu memiliki suara yang besar untuk bergabung dengan Uni Eropa, terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Euroskeptis yang sedang berkuasa di negara ini. Pada artikel ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya, baik itu di dalam pemerintahan dan di dalam masyarakat, terbagi atas dua kubu, yaitu kubu Pro-European dengan kubu Euroskeptis yang menolak keanggotaan Uni Eropa sebab mempertahankan kepentingan utama Islandia dalam bidang perikanan. Artikel ini merupakan artikel yang memberikan paparan sangat mendetail terhadap sisi demokrasi Islandia dengan memperhatikan suara masyarakatnya dari sisi wilayah dan preferensi serta dijabarkan juga dalam bentuk diagram yang akan

¹⁴ Baldur Thorhallsson. “The Skeptical Political Elite Versus the Pro-European Public: The Case of Iceland,” *Scandinavian Studies* 74, no.3 (2002): 348-379

mempermudah pembacanya untuk mengerti maksud dari pembuatan artikel tersebut. Selain itu juga, sisi politik sangatlah kental bukan hanya melihat sisi demokrasinya saja, tapi melihat sudut pandang kedaulatan, kepentingan nasional, dan partai politik Islandia. Namun, di sisi lain, artikel ini dibuat pada tahun 2002 dimana tidak akan ada pembahasan mengenai penarikan diri Islandia untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Literatur ketiga merupakan karya ilmiah yang berjudul “*Should Iceland Apply for EU Membership?: In Light of Current Situation, Would The Regular Consumer Gain from Being Part of EU?*”¹⁵ yang dibuat oleh Fannar Jens Ragnarsson dan Sædís Guðný Hilmarsdóttir yang berasal dari *Aarhus School of Business* tahun 2009. Karya ilmiah ini membahas pro dan kontra keanggotaan Islandia terhadap Uni Eropa dari sisi ekonominya. Stabilitas, pergantian mata uang Islandia, Krona, menjadi Euro, ekspor-impor, dan kedaulatan negara menjadi pertimbangan yang kuat bagi penentuan keanggotaan tersebut. Walaupun artikel ini juga tidak membahas soal penarikan Islandia, penulis melihat bahwa pemaparan sudut pandang ekonomi dalam artikel ini sangatlah mendetail dan dilengkapi dengan berbagai diagram ketika perekonomian Islandia di tahun 2008-2009, terutama masalah inflasi, pengangguran, nilai tukar, ekspor-impor. Pada artikel ini juga dijabarkan keuntungan dan kerugian yang akan diterima Islandia jika negara ini menjadi anggota dari Uni Eropa. Namun, kekurangan artikel ini adalah tidak ada penjabaran mengenai perkembangan perekonomian Islandia pada masa pembangunan pasca krisis yang seharusnya dapat memperkuat argumen dalam

¹⁵ Fannar Jens Ragnarsson dan Sædís Guðný Hilmarsdóttir, “Should Iceland Apply for EU Membership?: In Light of Current Situation, Would the Regular Consumer Gain from Being Part of EU?” (BSc(B) 6. Semester Aarhus School of Business, 2009)

artikel ini untuk menunjukkan ketidakharusan negara ini untuk menjadi anggota Uni Eropa.

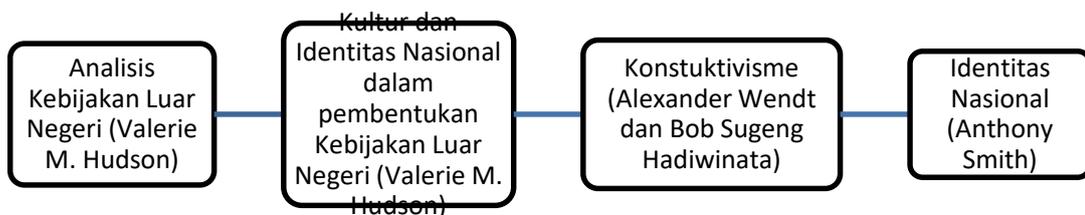
Literatur keempat berasal dari penelitian yang dibuat oleh Gudbergur Ragnar Aegisson dengan judul “*The Icelandic European Debate: Explaining Icelandic Attitudes Towards EU Membership.*”¹⁶ Penelitian ini mendeskripsikan perdebatan di dalam pemerintahan Islandia sejak tahun 1957-2010. Penelitian ini dengan baik menjabarkan bagaimana perdebatan di dalam pemerintahannya untuk bergabungnya Islandia untuk menjadi anggota Uni Eropa yang didasarkan pada identitas nasional yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan *research method* dengan membandingkan dua media surat kabar terbesar di Islandia dan teori yang digunakannya adalah teori neo-fungsionalisme dan liberalisme intergovernmental. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang ekonomi sebagai pengaruh utama atas sikap Islandia terhadap Uni Eropa dengan membandingkan dengan latar belakang sektoral, kultural, juga pertahanan dan keamanan yang kurang berpengaruh pada sikap Islandia tersebut. Menurut penulis, penelitian ini telah tajam membahas bagaimana sikap Islandia selama ini dalam hubungannya dengan Uni Eropa. Namun, artikel ini melakukan perbandingan antar latar belakangnya hanya melalui media surat kabar tersebut yang mungkin bersifat subjektif, padahal terdapat sumber-sumber lain yang lebih objektif.

Keempat artikel dan karya ilmiah di atas, hanya sebatas memberikan deskripsi perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Islandia bergabung dengan Uni Eropa. Dengan kata lain, belum ada pembahasan terkait penarikan diri Islandia

¹⁶ Gudbergur Ragnar Aegisson, “*The Icelandic European Debate: Explaining Icelandic Attitudes Towards EU Membership.*” (master’s thesis Lund University, 2011)

dalam proses akses menjadi anggota Uni Eropa melalui sudut pandang identitas dan kultur politik. Selain itu, kebijakan suatu negara seringkali diperkuat oleh argumen yang berasal dari berbagai sudut pandang, namun kebijakan tersebut belum tentu tajam jika hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Begitu juga argumen-argumen yang terkait dengan pemaparan hasil penelitian. Oleh sebab itu, melihat artikel dan hasil karya yang telah dijabarkan di atas, penulis berusaha menganalisis bagaimana identitas dan kultur politik negara ini memberikan pengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri pada kasus penghentian proses akses keanggotaan Uni Eropa.

1.5 Kerangka Pemikiran



Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah terangkum pada subbab sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan dan konsep yang dapat digunakan. Namun penulis akan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang difokuskan kepada proses pembentukannya menggunakan model *cultural and identity* menurut Valerie M. Hudson untuk menelaah latar belakang pembentukan kebijakan luar negeri Islandia terkait dengan sikap yang berlangsung. Pendekatan

ini akan didukung juga konstruktivisme dalam melihat konsep identitas nasional dan kultur politik yang mempengaruhi interaksi masyarakat.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan hubungan luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengejar kepentingan nasional serta sebagai perwujudan eksistensi negara tersebut pada kancah internasional. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri atau politik luar negeri merupakan upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya yang mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Teori ini dijadikan teori utama yang akan dipakai pada setiap bab dalam penelitian ini. Tujuan dari negara melakukan kebijakan luar negeri pada dasarnya untuk melangsungkan kehidupan negara tersebut.¹⁷

Kebijakan luar negeri merupakan hasil dari konstruksi identitas dan kepentingan nasional secara habitual, sehingga hal ini dapat membentuk fakta-fakta sosial jika dikaitkan dengan struktur konstitutif negara tersebut beserta faktor lingkungan eksternalnya. Konsep ini akan digunakan untuk mempertajam argumen penulis dalam melakukan analisis di Bab IV. Penulis menggunakan model kultur dan identitas nasional dalam pengambilan kebijakan luar negeri yang dicetuskan oleh Valerie M. Hudson. Pada dasarnya kebijakan luar negeri merupakan perpanjangan dari kebijakan politik domestik oleh sebab itulah pada umumnya preferensi dari kebijakan luar negeri bergantung pada kondisi, kebutuhan dan, inspirasi aktor dari dalam negeri. Banyaknya aktor yang terlibat pada ranah politik domestik membuat mungkin terbentuk rezim-rezim dengan ideologi tertentu. Oleh sebab itu, kepentingan negara tersebut menjadi hal yang krusial agar negara

¹⁷ Steve Smith, "Theories of Foreign Policy: An Historical Overview," *Review of International Studies*, Vol. 12, No. 1 (Jan., 1986), pp. 13-29.

mendapatkan stabilitas. Selain faktor-faktor yang bersifat realis, penentuan kepentingan nasional juga didasari oleh identitas nasional dan budaya politik yang terbentuk dalam negara. Pembentukan budaya politik suatu negara ditentukan oleh nilai dan norma serta identitas yang dimiliki oleh masyarakatnya, meskipun sedikit atau banyaknya juga pembentukan tersebut didorong oleh budaya yang berasal dari luar negara yang bersangkutan.

Identitas nasional dan budaya suatu negara membentuk motivasi suatu negara dalam mempertimbangkan kebijakan luar negeri. Kesadaran akan posisi negara pada akhirnya akan membentuk kultur dalam masyarakat. Aktivitas dan tingkah laku manusia merupakan produk dan komponen dalam budaya yang dapat ditentukan berdasarkan kesadaran atas identitas nasional dan budaya, baik itu berasal dari masyarakat negara tersebut ataupun setidaknya mendapat pengaruh dari lingkungan eksternal. Konteks sejarah, budaya, sistem politik dan sosial merupakan hal-hal yang dapat mengkonstruksi identitas suatu agen tanpa melanggar aturan dan norma yang telah terbentuk sebelumnya. Menurut konstruktivisme, cara masyarakat menyalurkan aspirasi kepentingannya kepada representatif adalah dengan mengasumsikan bahwa negara merupakan entitas yang satu, layaknya seorang individu sehingga aspirasi menjadi digeneralisasi dengan mengacu pada identitas nasional yang dimiliki negara tersebut. Dengan mengacu pada identitas nasional tersebut maka kepentingan nasional pada dasarnya dibentuk secara endogen, bukanlah secara eksogen pada sistem internasional. Walaupun terbentuknya secara endogen, namun kepentingan nasional suatu negara dapat diterapkan secara eksogen, yaitu dengan penerapan kebijakan luar negeri. Dengan

hal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan dalam negeri dengan basis kepentingan nasional.

Dalam melakukan analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri menggunakan pendekatan kultural dan identitas nasional, budaya setidaknya memiliki tiga fungsi utama yang pada akhirnya akan membentuk identitas nasional; yaitu sebagai perwujudan dari pemaknaan bersama suatu masyarakat, sebagai perwujudan dari preferensi masyarakat sesuai dengan norma dan kebiasaan, dan sebagai penentu tingkah laku serta respon individu dalam masyarakat dalam menentukan kepentingannya. Berdasarkan makna dari identitas nasional dan kultur tersebut kemudian dapat dipahami bahwanya setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda pula. Jika kebijakan luar negeri yang dirumuskan dan diputuskan adalah sama antara satu negara dengan yang lainnya, respon dari masyarakat masing-masing negara belum tentu sama, oleh karena keberadaan kultur yang berbeda. Maka dapat disimpulkan, identitas nasional merupakan faktor yang sangat kuat dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri, dimana pengambilan keputusan disesuaikan oleh “sejarah heroik” yang pernah dialami oleh suatu negara dibanding dengan pemikiran rasional para penentu kebijakan. Peranan masyarakat pada negara tersebut dapat mempertajam kebijakan yang akan diambil oleh negara dan sifatnya cenderung tertutup. Oleh sebab itu, jika terdapat organisasi atau negara lain yang memiliki perbedaan identitas dan budaya, maka negara tersebut cenderung untuk menutup diri.¹⁸

¹⁸Valerie M Hudson. *Loc.Cit.* 103-123.

Melihat adanya pengaruh dari nilai, norma, budaya dan identitas masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara, maka teori konstruktivisme hadir sebagai alat bantu analisis dalam penelitian ini. Teori ini bersifat humanis karena berfokus pada ide manusia sebagai awal dari segala fenomena sosial yang terjadi. Asumsi dasar dari teori ini adalah bagaimana ide dapat membuat suatu konstruksi subjek atau objek yang memiliki makna-makna tertentu dan diatur oleh nilai dan norma sosial. Pada teori ini, aktor-aktor pada studi hubungan internasional berinteraksi atas latar belakang sejarah, budaya dan politiknya sehingga memproyeksikan hubungan yang bersifat intersubjektif. Konstruktivisme merupakan mempertanyakan bagaimana kaum rasionalisme meyakini bahwa proses institusionalisasi menjadi solusi untuk menghindari perang dan menjaga perdamaian, padahal institusi tersebut dapat mengalami perubahan identitas, kepentingan, dan praktiknya sewaktu-waktu.¹⁹

Wendt, sebagai salah satu tokoh pionir konstruktivisme, mempercayai bahwa sistem internasional dapat berubah oleh karena sifat manusia yang selalu berkembang sesuai bagaimana intensnya interaksi dilakukan. Terdapat dua prinsip yang melandasi pembentukan interaksi manusia.²⁰

Prinsip pertama dalam pendekatan ini adalah kesamaan ide terhadap tindakan manusia didasarkan pada objek dengan makna tertentu bagi aktor tersebut.

¹⁹ Trine Flockhart. "Constructivism and Foreign Policy," *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*, Edisi Kedua, Ed. Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne (Oxford: Oxford University Press, 2012), 78.

²⁰ Christian Reus-Smit, "Constructivism," *Theories Of International Relations*, Edisi Ketiga, Ed. Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, Dan Jacqui True (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 185-212.

Distribusi kekuasaan memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi kalkulasi negara dalam melakukan suatu tindakan. Namun hal ini bergantung pada pemahaman intersubjektif dan ekspektasi berdasarkan pengetahuan negara tersebut dalam pembentukan konsepsi “saya” dan “mereka.” Komitmen dan arti identitas tertentu bervariasi, tetapi setiap identitas adalah definisi sosial yang melekat pada aktor yang didasarkan pada teori-teori yang secara kolektif dimiliki oleh pelaku tentang diri mereka satu sama lain dan membentuk struktur dunia sosial. Identitas merupakan faktor dasar pembentukan kepentingan, terutama ketika mendefinisikan situasi tertentu sehingga pada akhirnya akan membentuk peranan suatu negara dalam suatu sistem yang dilandasi oleh nilai dan norma.

Prinsip kedua dari konstruktivisme mengenai kesamaan ide tersebut telah membentuk kepentingan dan identitas untuk membangun kesadaran rasional akan pengambilan tindakan, termasuk kerjasama dan melakukan hubungan dengan pihak lain. Konsepsi diri dan kepentingan cenderung "mencerminkan" bagaimana perilaku terhadap aktor lain dari waktu ke waktu. Asas pembentukan identitas ini ditangkap oleh gagasan interaksionis simbolik dari "looking-glass self", yang menegaskan bahwa diri adalah refleksi dari sosialisasi aktor. Proses pensinyalan, menafsirkan, dan menanggapi melengkapi "tindakan sosial" dan memulai proses menciptakan makna intersubjektif. Dimulai dengan pembentukan ekspektasi terhadap aktor tertentu dalam menentukan perilaku. Identitas dan kepentingan terkadang membentuk dilemma tertentu dalam rangka menentukan sikap terhadap lawan. Di sisi lain, kedua hal ini terbentuk juga atas dasar pemahaman bersama dan selalu berproses, sama halnya dengan proses sosial. Mengubah sikap akan mengubah pengetahuan intersubjektif yang membentuk sistem.

Dalam bukunya, Bob Sugeng Hadiwinata memberikan simpulan yang jelas mengenai inti dari pemikiran pada konstruktivisme menurut para ahli, yaitu konstruksi kepentingan dan identitas suatu negara dalam proses sosialisasi dan pembelajaran berkelanjutan yang dibentuk atas dasar kausalitas ideal, adanya aturan konstitutif berdasarkan nilai dan norma yang membentuk pola tingkah laku dalam masyarakat, dan masyarakat cenderung mengkonstruksi realitas atas apa yang terjadi di sekelilingnya.²¹ Islandia yang menjadi variabel utama pada penelitian ini merupakan arena yang ideal untuk dijadikan kajian teori konstruktivisme, terutama pada bentuk sikapnya terhadap Uni Eropa yang didasarkan ada kesadaran akan identitas nasional yang dimiliki. Menurut Wendt, institusi mempengaruhi perilaku anggotanya dengan cara mengkonstruksi kepentingan, identitas, serta bagaimana interaksi dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan proses pembelajaran yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dibentuk pada proses perkembangan Uni Eropa, termasuk kebijakan untuk perluasan keanggotaan.²²²³

Dalam menjelaskan bagaimana identitas nasional yang dimiliki Islandia dapat menjadi pengaruh atas sikapnya terhadap Uni Eropa, akan menggunakan konsep identitas menurut Anthony D. Smith. Secara sederhana, identitas nasional dapat diartikan sebagai bagaimana suatu aktor, baik itu individu maupun kolektif

²¹ Bob Sugeng Hadiwinata, "Konstruktivisme: Pentingnya Norma, Kepentingan, Identitas, dan Intensi dalam Hubungan Internasional," *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2017), 260-282.

²², Thomas Christiansen Knud Erik Jorgensen, Dan Antje Wiener. The Social Construction Of Europe. *Journal Of European Public Policy*, Vol 6 No. 4 1999, 528-544

²³ Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics", *International Organization*, Vol. 46, No. 2. (Spring, 1992), Pp. 391-425.

dibedakan dalam hubungan sosialnya dengan aktor lainnya.²⁴ Identitas dan kepentingan nasional menjadi hal yang penting bagi suatu negara dalam membuat berbagai kebijakan. Identitas menurut Wendt merupakan salah satu kunci penting dalam hubungan internasional yang dapat membentuk tingkah laku dan motivasi aktor-aktornya.²⁵ Identitas akan membentuk batasan suatu bangsa dengan bangsa yang lain dan merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk menentukan bagaimana memposisikan diri dalam menghadapi kondisi di lingkungan eksternal.²⁶

Menurut Smith, identitas nasional bertindak sebagai penentu karakteristik suatu negara dan menjadi faktor pembeda dengan negara lain.²⁷ Identitas nasional juga dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan kepentingan negara. Pada dasarnya, negara tidak akan mengejar kepentingan yang kurang sesuai dengan identitas bangsa, karena tidak akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Ketika kepentingan nasional terbentuk dan tidak bisa dihasilkan atau didapatkan sendiri, negara tersebut akan mengejar kepentingan negara tersebut sehingga keluar batas-batas wilayahnya. Maka, hubungan luar negeri merupakan hal yang esensial bagi setiap negara. Peran suatu negara pada kancah regional atau internasional merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan sesuai dengan kepentingan internalnya. Dengan kata lain, identitas nasional juga menentukan peranan negara dalam melakukan hubungan luar negeri. Sedangkan, dalam melakukan hubungan luar negeri, suatu negara juga bergantung pada

²⁴ Richard Jenkins, *Social Identity* (London: Routledge, 1996), 4.

²⁵ Alexander Wendt. *Loc.Cit.*,

²⁶ Scott Burchill, *The National Interest In International Relations Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 195.

²⁷ Anthony D. Smith, "National Identity," (London: Pinguin Group, 1991), 1-18.

budaya yang dianut. Pembentukan budaya suatu negara dapat dipengaruhi faktor eksternal suatu negara, namun pada dasarnya, faktor yang berasal dari dalam negaralah yang berperan penting di dalamnya. Dalam Smith merumuskan empat hal dasar yang dapat menentukan pembentukan peranan aktor berdasarkan identitas nasionalnya. Pertama, gender menentukan seperti apa peranan yang menjadi tanggung jawab suatu aktor dalam mendapatkan hak dan melakukan segala kewajibannya. Kedua, peranan secara territorial. Setiap individu memiliki peranannya masing-masing dalam bidang tertentu tergantung kepada cakupan wilayah yang ditempatinya. Ketiga, peranan sosio-ekonomi atau tingkat kemakmuran suatu aktor yang mendeskripsikan kelas yang dimilikinya. Ketiga, peranan sosio-religius yang berkaitan dengan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu aktor sehingga mempengaruhi pola interaksi dengan aktor lainnya.²⁸

Dalam menentukan identitas Islandia sebagai suatu bangsa, setidaknya terdapat setidaknya lima komponen pembentuknya. Pertama, pada dasarnya identitas melibatkan komunitas politik yang akhirnya membentuk institusi dengan penerapan hak dan kewajiban tertentu bagi anggotanya. Institusi tersebut memiliki definisi yang jelas mengenai wilayah cakupan yang mengikat, sehingga anggotanya akan dengan mudah mengidentifikasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap institusi tersebut. Dengan kata lain, bangsa merupakan komunitas masyarakat yang mematuhi institusi dan hukum yang sama di dalam suatu wilayah. Pembentukan institusi dan bangsa yang dimaksud menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah bersejarah (*historic territory*). Hal ini disebabkan adanya sejumlah proses dan perjuangan sehingga mengalami peristiwa bersejarah yang membentuk karakter

²⁸ *Ibid.*

bangsa tersebut yang disertai dengan mitos, tradisi, dan budaya di dalamnya sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan komponen yaitu *common myths and historical memories*. Segala ingatan, ide, dan hal-hal yang bersifat konkrit, termasuk masyarakat itu sendiri dan sumber dayanya bersifat eksklusif dan tidak seharusnya dimanfaatkan oleh pihak asing. Ketiga, *common public culture* yang merupakan budaya yang diakui secara umum dan mempengaruhi tingkah laku bangsanya. Keempat, *common legal rights and duties for all members* yang mencerminkan adanya penerapan persamaan setiap individu di depan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana hukum serta pemerintahan suatu institusi dijalankan dan dipatuhi demi kepentingan bersama. Kelima, *common economy with territorial mobility members* yang menjelaskan mengenai sistem ekonomi yang diterapkan suatu bangsa yang mencerminkan bagaimana suatu bangsa identik dengan sistem perekonomian tertentu sesuai dengan teritori dan kekayaan sumber daya yang dimilikinya.²⁹ Dalam penentuan identitas nasional suatu institusi tersebut pada umumnya suatu bangsa memiliki nilai-nilai dan norma sehingga membentuk budaya dan ideologi yang dianut oleh masyarakat.

²⁹ *Ibid.*, 8-14.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang merupakan proses pendalaman eksploratif dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi manusia. Penulis akan mengumpulkan data dan bukti terkait studi kasus pada penelitian, menjabarkan fenomena yang terjadi, melaporkan informasi terkait interaksi yang dilakukan oleh objek-objek penelitian, serta menyusun teori-teori untuk mendukung proses analisis. Dengan bersumber dan panduan dari *Methods Map* (Sage Research Methods), metode analisis yang digunakan adalah *Single Case Study*. Metode ini merupakan metode yang menggunakan satu kasus yang dinilai dapat atau tidak berdasarkan asas teoritis, analitis, atau metodologis yang sangat bermanfaat untuk memahami fenomena atau situasi tertentu.³⁰ Penelitian ini akan berfokus pada topik analisis kebijakan luar negeri dengan kasus spesifik penghentian Islandia dalam proses akses keanggotaan Uni Eropa.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Maksud dari jenis penelitian ini adalah penulis diharapkan dapat melakukan penggambaran secara mendalam dan jelas mengenai data-data yang telah dikumpulkan beserta kerangka teori yang telah disusun dan kemudian keduanya akan dielaborasi pada proses analisis demi menjawab rumusan masalah.

³⁰ “Single Case”, Sage Research Methods: *Methods Map*, <http://methods.sagepub.com/methods-map/single-cases>

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi ini menggunakan data sekunder yang sumber-sumbernya berasal dari buku yang relevan, jurnal, dokumen resmi yang diterbitkan lembaga terkait penelitian, internet, teori dan pemaparan kasus yang didapat pada saat perkuliahan, serta berbagai sumber literatur sah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi atas 5 bab. Sebagai pendahuluan, Bab I akan berisi pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari topik penelitian.

Bab II memiliki tujuan untuk memberikan pemaparan mengenai identitas nasional Islandia yang mempengaruhi sikap terhadap Uni Eropa. Oleh sebab itu, bab ini akan dimulai dengan subbab pertama yang menjelaskan identitas nasional Islandia. Pada subbab selanjutnya akan dijelaskan mengenai peranan Islandia di Eropa.

Bab III memberikan paparan mengenai perdebatan Islandia dalam mempertimbangkan keterlibatannya ke dalam proses integrasi di Eropa, terutama yang berkaitan dengan keanggotaan terhadap Uni Eropa yang terdiri atas tiga bagian utama. Bagian pertama, mendeskripsikan tentang hubungan Islandia dengan

Eropa pada masa awal kemerdekaan hingga krisis ekonomi tahun 2008. Bagian kedua menjelaskan Islandia pada masa akses keanggotaan dengan Uni Eropa. Bagian terakhir menjelaskan tentang hubungan Islandia setelah menghentikan proses akses hingga saat ini.

Bab IV bertujuan untuk memaparkan hasil analisis dari rumusan masalah: “Bagaimana isu identitas nasional mempengaruhi status keanggotaan Islandia terhadap Uni Eropa?” Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulis akan membagi ke dalam dua subbab. Subbab pertama merupakan bagian yang menjelaskan komponen pendorong apa saja yang menjadi perbedaan identitas Uni Eropa dan identitas Islandia sebagai pertimbangan negara ini dalam menentukan status keanggotaan terhadap Uni Eropa. Subbab kedua mendeskripsikan tentang peranan politik domestik Islandia sebagai penentu pola interaksi dengan Uni

Setelah melewati proses menjabaran mengenai identitas dan budaya Islandia pada Bab II, penjelasan mengenai dinamika status keanggotaan Islandia terhadap Uni Eropa pada bab III, serta analisis kasus untuk menjawab rumusan masalah yang dideskripsikan pada bab IV, maka pada Bab V ini penulis menarik kesimpulan atas hasil akhir penelitian ini.